



PRAKTEK POLITIK UANG PADA PEMILUKADA SERENTAK 2015 (STUDI KASUS DI DESA SIMPASAI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA)

Dr.Hj. Maemunah, S.Pd., MH & MAsita
(Dosen Perserikatan Universitas Muhammadiyah Mataram)

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 01-03-2016
Disetujui: 30-03-2016

Kata Kunci: *Praktek Politik Uang, Pemilukada Serentak*

ABSTRAK

Abstrak: Praktek politik uang (*money politics*) merupakan praktek yang sering terjadi di setiap pemilu. Politik uang juga adalah salah satu faktor penyebab demokrasi berbiaya tinggi, praktek ini merugikan masyarakat dan mencederai asas pemilu. Praktek politik uang juga merupakan bagian dari bentuk korupsi politik, praktek politik uang menjadi isu keprihatinan dan ancaman nyata dalam menjalankan sistem demokrasi. berdasarkan uraian permasalahan peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat terhadap praktek politik uang pada pemilukada serentak 2015 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan bagaimanakah bentuk dari politik uang pada pemilukada serentak 2015, dengan tujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima terhadap praktek politik uang pada pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2015. Untuk mengetahui bentuk-bentuk praktek politik uang pada pelaksanaan pemilukada serentak 2015 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. lokasi penelitian dilakukan di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan menggunakan subyek penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, tehnik analisis yang digunakan adalah diawali dengan proses pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran pemilukada serentak tahun 2015 persepsi penyelenggara terhadap pelaksanaan pemilukada serentak 2015 bahwa pemilukada serentak 2015 ini merupakan pemilukada serentak yang pertama dilakukan oleh bangsa Indonesia sehingga persepsi penyelenggara bahwa pemilukada serentak adalah suatu pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah yang tidak terlepas dari penggunaan anggaran yang menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya politik uang tetapi politik uang dapat diminimalisir karena penyelenggara pemilukada melakukan sosialisasi tentang hal tersebut. Bentuk-bentuk politik uang dalam pemilukada serentak pada tahun 2015 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima berupa penyaluran bantuan melalui bantuan sosial yang dilakukan oleh peserta pemilu ialah berbentuk uang, berbentuk material, berbentuk barang, dan berbentuk sembako.

A. LATAR BELAKANG

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini juga dicantumkan didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pemilu menurut ketentuan Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam pelaksanaan pemilu meskipun telah ada undang-undang serta peraturan yang khusus mengatur tentang pelaksanaan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik namun masih juga terjadi pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran dan kecurangan ada yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat salah satu kecurangan pada pemilu adalah politik uang yang memaksa masyarakat untuk memilih menentukan peserta pemilu dengan melakukan adanya politik uang tersebut.

Intervensi uang kehidupan politik merupakan fenomena universal di Indonesia, hubungan antara aspek ekonomi dan politik adalah ciri di balik model

pembangunan negara menganut sistem demokrasi. Karena uang merupakan medium atau alat yang sangat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya. Maka sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (*konvertibel*).

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas perlu dicarikan solusinya supaya praktek politik uang tidak semakin marak, bahkan akan menimbulkan kerusuhan, dan bentrok antar pasangan calon kepala daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang pandangan masyarakat terhadap partai politik. Dengan judul "Praktek Politik Uang Pada Pemilu 2015 di Kabupaten Bima".

B. METODE PENELITIAN

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, (Moleong, 2007:6)

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai lokasi untuk mengumpulkan data. Lokasi yang digunakan adalah di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

3. Teknik Penentuan Subyek Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif maka subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara *purposive sampling* dengan tujuan tertentu.

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono (2013:218-219) memberikan definisi kedua teknik tersebut sebagai berikut:

- a. *Purposive sampling*
- b. *Snowball sampling*

Berdasarkan pendapat di atas yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lambu, Ketua Panitia Pengawasan Desa Simpasai, dan Ketua Pemberdayaan Kesehatan Kemasyarakatan Desa Simpasai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

- **Wawancara**

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. (Sugiyono, 2012: 231)

Menurut Saebanik dkk, (2009:133). Secara umum, metode wawancara dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaan-pertanyaannya telah disiapkan seperti menggunakan pedoman wawancara.
2. Wawancara semistruktur yaitu wawancara yang sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam
3. Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang lebih bebas, lebih mendalam dan menjadikan pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya saja.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semistruktur karena wawancara bersifat sudah cukup mendalam karena ada penggabungan antara wawancara yang berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan yang lebih luas dan mendalam. Wawancara ini memakai kata-kata pertanyaan yang dapat diubah saat wawancara, dengan penyesuaian kebutuhan dan situasi wawancara, dengan catatan tidak menyimpang dari informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

- **Metode Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain. (Sugiyono, 2012: 240).

Dari pengertian tersebut dapat dikaitkan bahwa metode dokumentasi adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan jalan mencatat data-data atau catatan resmi yang ada di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Tujuan menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data tentang jumlah penduduk, situasi dan keadaan sosial masyarakat Kabupaten Bima.

5. Jenis dan Sumber Data

- **Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2009: 14), jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Data kualitatif
2. Data Kuantitatif

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena data informasi yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau keterangan-keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik.

- **Sumber Data**

Ada dua macam sumber data didalam penelitian ini, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Sumber data primer
2. Sumber data sekunder

Jika disimak dari keterangan di atas, maka sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari responden. Adapun

sumber data dari penelitian ini adalah Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Lambu, Ketua Panitia Pengawasan Desa Simpasai, dan Ketua Pemberdayaan Kesehatan Kemasyarakatan Desa Simpasai.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

- **Pengumpulan Data,**
 1. Reduksi data
 2. Display data
 3. Verifikasi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

• Profil Lokasi Penelitian

Desa Simpasai merupakan salah satu dari 14 Desa dari wilayah Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, yang terletak 6 km kearah barat dari kota kecamatan nambu. Desa simpasai mempunyai luas wliyah 13.235.44 H dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Naru Kecamatan Sape
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mangge/Hindirasa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Monta Baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lanta Barat

mata pencaharian masyarakat Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima adalah mayoritas buruh tani, Desa Simpasai juga memiliki lahan pertanian yang sangat besar sehingga sebagian masyarakatnya mengandalkan dari hasil pertanian.

• Jumlah penduduk

Tahun 2014 jumlah penduduk Desa Simpasai Kecamatan Lambu adalah sebesar 3556 jiwa yang terdiri atas laki-laki 1178 jiwa da perempuan 1178 dengan jumlah kepala keluarga 1428 kepala keluarga.

a. Persepsi Penyelenggara Pemilukada terhadap Praktek Politik Uang pada Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui Persepsi penyelenggara pemilukada terhadap praktek politik uang pada pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Nursusila, umur 36 tahun selaku ketua Komisi Umum Kabupaten Bima yaitu :

Pemilukada kali ini paling minim atau bahkan tidak ada indikasi praktek politik uang, karena jauh sebelum ini kami telah melakukan beberapa bentuk sosialisasi terkait masalah politik uang ini diantaranya adalah kami telah melakukan seminar mengenai politik terhadap masyarakat dan saya pikir ini juga salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang adalah salah satu perbuatan yang haram yang dapat merusak daerahnya dalam kurun waktu yang sangat lama, dan saya berpendapat Sangat haramlah ketika suara itu diperjualbelikan, namun berdasarkan hasil laporan dan pemantauan yang kami lakukan alhamdulillah masyarakat bima yang dianggap sebagai pemilih yang berada di zona merah ternyata itu tidak benar, pemilukada serentak kemarin merupakan pemilukada yang bersih sebab tidak ada indikasi praktek politik uang, tidak ada satupun kasus politik uang pada pemilukada

serentak 2015 dan saya menganggap masyarakat bima sudah tau mana yang baik dan buruk dan bisa menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin yang sebenarnya. ini semua berkat pemerintah daerah dan masyarakat mampu menjaga asas-asas pemilu atau demokrasi itu sendiri. (wawancara pada tanggal 6 Juni 2016).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui Persepsi penyelenggara terhadap praktek politik uang pada pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ihwan Sumantri umur 37 Tahun selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Lambu:

Praktek politik uang sebenarnya tidak ada karena kami sudah mewanti-wanti dan melakukan sosialisasi bahwa praktek politik uang merupakan hal yang tidak benar untuk di terapkan dan akan berdampak buruk terhadap pesta demokrasi dan akan merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri, jadi pada saat saya di berikan tanggungjawab sebagai ketua panwaslu kecamatan pada pemilukada kemarin saya smenganggap bahwa masyarakat Kecamatan Lambu sudah dewasa dalam menyikapi segala persoalan, sehingga kami tidak melihat ada indikasi-indikasi politik uang jadi bisa kami simpulkan bahwa pemilukada kemarin merupakan pemilukada yang bersih tampa ada indikasi praktek politik uangnya.(wawancara pada tanggal 13 Juni 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui apakah pernah bapak di berikanolehcalonkepaladaerahsesuatubarang yang bernilaiuang pada Pemilukada Serentak Tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ihwan Sumantri umur 37 Tahun selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Lambu:

Kalau saya pribadi tidak pernah menerima uang atau barang karena saya pikir apabila saya menerima pemberian orang tertentu dan dengan alasan tertentu pula maka bukan hanya nama saya yang akan rusak namun akan merusak nama baik semua lembaga yangberkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ini adalah amanah yang diberikan masyarakat terhadap saya untuk melakukan pengawasan maka dari itu saya harus menjaganya. (wawancara pada tanggal 13 Juni 2016).

Selanjutnya Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui Persepsi penyelenggara pemilukada terhadap praktek politik uang pada pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Azis umur 32 Tahun selaku Ketua Panitia Pengawasan : Berdasarkan hasil pengamatan selama saya memegang tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pemilukada serentak kemari saya menganggap pemilukada kemarin merupakan pemilukada yang benar-benar bersih dan saya melihat tingkat pemahaman masyarakat desa Simpasai terhadap politik sudah mulai meningkat itu sebabnya praktek politik uang tidak ada (wawancara pada tanggal 20 Juni 2016)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sri Hartati umur 36 Tahun selaku Ketua Pemberdaya Kesehatan Kemasyarakatan Desa Simpasai Kecamatan Lambu: Kalau dalam pemilukada kemarin saya tidak melihat dan mendengar informasi mengenai praktek politik uang dan saya pkir masyarakat desa Simpasai sudah cerdas untuk

menentukan mana pemimpin yang merusak citra demokrasi dan yang akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan daerahnya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memahami nilai-nilai agama serta mempunyai moral dan etika yang baik jadi apabila ada kandidat yang sengaja membrikan uang atau barang secara cuma-cuma bisa kita simpulkan dia adalah pemimpin yang tidak baik untuk kita pilih karena kandidat ini bermain dengan politik kotor (wawancara tanggal 27 Juni 2016).

Dari hasil wawancara dengan keempat informan di atas dapat diketahui secara garis besarnya bahwa usaha penyelenggara pemilukada serentak 2015 kemarin agar tidak terjadi pelanggaran yaitu salah satunya praktek politik uang itu sendiri berhasil itu terbukti dengan tidak adanya indikasi praktek politik uang yang di temukan oleh pihak penyelenggara pemilu, pengawasan yang ketat yang mereka lakukan sehingga melahirkan pemilukada serentak yang bersih dari praktek politik uang. Ini tidak terlepas dari peran pihak-pihak yang dipercaya untuk memegang amanah untuk melakukan pengawasan terhadap pemilukada kemarin sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum pesta demokrasi dilakukan, dan masyarakat desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten sudah pintar menentukan dan memahami bahwa pesta demokrasi bukan ajang untuk memeperjualbelikan suara mereka melainkan untuk menentukan mana pemimpin yang benar-benar mampu menjaga amanah yang mereka berikan. masyarakat bima sudah pintar menentukan pilihan mereka dan pintar memahami bahwa politik uang itu perbuatan yang tidak benar.

b. Bentuk politik uang pada pelaksanaan pemilukada serentak 2015 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai bentuk-bentuk praktek politik uang pada pelaksanaan pemilukada serentak 2015 di desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima perolehan data atau informasi sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan ibu Siti Nursusila 36 Tahun selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima yaitu:

Bentuk praktek politik uang sekilas yang kami dengar bahwa ini lebih kepada bantuan-bantuan sosial jadi sebaiknya pemerintah jangan memberikan bantuan yang menimbulkan fitnah bahwa akan terjadi indikasi praktek politik uangnya, yang saya ketahui terkait bentuk politik uang bukan saja uang akan tetapi dalam bentuk barang yaitu pemberian yang berupa baju, sarung, jilbab dan bisa juga dalam bentuk sembako seperti bantuan beras, mie, telur serta bahan pokok lainnya. (Wawancara pada tanggal 6 Juni 2016).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ihwan Sumantri 37 Tahun selaku Ketua Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan Lambu :

Bisa saja berbentuk uang, barang atau jasa maksudnya adalah bahwa ketika para calon kandidat menjanjikan sesuatupun itu sudah termasuk bentuk politik uang itu sendiri saya pikir banyak bentuknya termasuk juga apabila ada kandidat yang memberikan bantuan secara cuma-cuma jelang pemilukada maka tidak menutup kemungkinan dia menginginkan timbal balik atas apa yang dia berikan istilahnya adalah ini adalah transaksi

antara masyarakat dan calon itu sendiri (wawancara pada tanggal 13 Juni 2016).

Selanjutnya wawancara dengan bapak Abdul Azis umur 32 Tahun selaku Ketua Panitia Pengawasan Pemilukada Desa Simpasai :

Bentuk politik uang bukan hanya uang saja akan tetapi banyak bentuknya salah satunya berupa barang yaitu rokok, baju, sarung, tikar, pemberian barang pada saat jelang pemilu walaupun dengan alasan tertentu itu sudah termasuk bentuk politik uang jadi seharusnya tidak ada pembagian secara gratis atau menyumbangkan sesuatu kalau menjelang pemilukada (Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2016).

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sri Hartati 36 Tahun selaku Ketua Pemberdayaan Kesehatan Kemasyarakatan Desa Simpasai Kecamatan Lambu :

Kalau saya memahami bentuk politik uang itu sendiri sebagai pemberian uang, sembako seperti beras, telur, mie dan barang seperti baju, sarung secara cuma-cuma menjelang pemilu akan tetapi tetap menginginkan imbalan. (Wawancara Pada Tanggal 27 Juni 2016)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat diketahui secara garis besar bahwa bentuk politik uang bukan hanya uang melainkan ada bentuk lain seperti barang dan sembako berupa sarung, baju, mie, telur, beras yang diberikan secara cuma-cuma oleh kandidat kepada masyarakat dengan mengharapkan imbalan itu sudah termasuk bentuk praktek politik uang jadi sebenarnya pemberian barang secara cuma-cuma menjelang pemilu itu sudah termasuk indikasi permainan transaksi jual beli suara.

2. PEMBAHASAN

a. Persepsi Penyelenggara Pemilukada terhadap Praktek Politik Uang pada Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2015

Berdasarkan hasil penelitian bahwa persepsi penyelenggara pemilukada serentak Kabupaten Bima Praktek Politik uang adalah pemberian uang atau barang, atau fasilitas tertentu, dan janji kepada para orang-orang tertentu agar seseorang dapat dipilih apakah misalnya menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah. Namun masyarakat Bima sudah pintar menentukan pilihan mereka dan pintar memahami bahwa politik uang itu perbuatan yang tidak benar mereka memahami bahwa ketika seorang kandidat memberikan uang pada saat pemilu atau mengeluarkan uang yang sangat banyak pada saat menjadi calon dan ketika dia menang dia akan mengembalikan uangnya jadi dia sudah tidak memikirkan apa yang dia lakukan agar rakyatnya sejahtera melainkan bagaimana caranya uang yang sudah habiskan dengan jumlah yang sangat banyak pasca mencalonkan diri kembali dengan cepat walau dengan cara mengambil hak-hak rakyatnya, dan ini tidak terlepas dari kerja pihak yang menyelenggarakan pemilu, mereka mengusahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap pemilu.

Masyarakat Bima menilai politik uang (*money politics*) sebagai sesuatu yang hal wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Politik uang (*money politics*) tidak menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat yang tidak hanya dipraktekkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar kedalam kultur masyarakat. Namun masyarakat Bima merupakan masyarakat yang sudah

dewasa untuk menghadapi pesta demokrasi di karenakan tidak ada satupun kasus politik uang yang di jumpai pada pemilukada serentak kemarin. Ini tidak terlepas dari kinerja penyelenggara pemilu dan seluruh stackholder yang telah melakukan kerja yang maksimal untuk menjaga ketertiban dan agar tidak terjadi kasus-kasus pelanggaran yang lain.

Pemilukada kali ini paling minim atau bahkan tidak ada indikasi praktek politik uang, karena jauh sebelum ini penyelenggara pemilukada telah melakukan beberapa bentuk sosialisasi terkait masalah politik uang ini diantaranya adalah melakukan seminar mengenai politik terhadap masyarakat dan ini juga salah satu cara untuk menyadarkan masyarakat bahwa politik uang adalah salah perbuatan yang haram yang dapat merusak daerahnya dalam kurun waktu yang sangat lama, dan Sangat haramlah ketika suara itu diperjualbelikan, namun berdasarkan hasil laporan dan pemantauan dari penyelenggara alhamdulillah masyarakat bima yang dianggap sebagai pemilih yang berada di zona merah ternyata itu tidak benar, pemilukada serentak kemarin merupakan pemilukada yang bersih sebab tidak ada indikasi praktek politik uang, tidak ada satupun kasus politik uang pada pemilukada serentak 2015 dan masyarakat bima sudah tau mana yang baik dan buruk dan bisa menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin yang sebenarnya, ini semua berkat pemerintah daerah dan masyarakat mampu menjaga asas-asas pemilu atau demokrasi itu sendiri.

Untuk itu diperjelas juga oleh Sutoro Eko, (2004) yang menyatakan bahwa politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pemilukada sebagai perayaan, kultur pragmatisme jangka pendek, lemahnya dialektika untuk mencari nilai-nilai ideal dan membangun visi bersama, lemahnya aturan main, dan seterusnya.

Ditambah oleh Hamidi, (2008: 49) Politik uang (*Money politic*) dapat dilakukan oleh calon legislatif kepada para pemilih selama tahapan-tahapan pemilu berlangsung dengan harapan pemilih dapat mengubah pilihannya sesuai dengan harapan yang bersangkutan baik dengan cara menggunakan hak pilihnya yang sesuai dengan harapan calon tersebut. Dalam kondisi sosial ekonomi, budaya dan politik yang terdapat ditingkat lokal, *money politic* tidak hanya diperuntukkan untuk para pemilih saja melainkan pihak-pihak tertentu yang dapat menguntungkan calon yang bersangkutan dalam memenangkan pemilu.

Berdasarkan kedua pendapat di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kandidat atau calon akan melakukan berbagai macam cara untuk memenangkan pemilukada termasuk dengan cara melakukan transaksi jual beli suara meski sudah di atur dan di larang pihak tertentu akan melakukan dengan cara yang tersembunyi yang tidak akan diketahui oleh orang.

b. Bentuk politik uang pada pelaksanaan pemilukada serentak 2015 di Desa Simpasai Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Bentuk-bentuk praktek politik yang sering di temukan di masyarakat banyak bentuk diantaranya adalah uang, barang, material serta bahan sembako. Berbentuk uang, uang adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau manuver Individual dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan faktor urgen yang

berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Berbentuk material, Dalam musim mencari suara, tak jarang fasilitas-fasilitas umum. Dengan memberi semen, pasir dan traktor. dan di manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang belum selesai di bangun.

Berbentuk barang sejatinya tidak ada pemberian (hibah) yang sifatnya cuma-cuma. Karena segalanya bentuk pemberian pada dasarnya akan selalu diikuti dengan sesuatu pemberian kembali berupa imbalan dalam bentuknya yang beragam. Yang sering di jumpai dikalangan masyarakat yaitu Sarung, jilbab, baju dan topi yang terjadi bukanlah sebatas pemberian dari seseorang kepada orang lain. Melainkan suatu sistem tukar menukar pemberian yang dilakukan. oleh dua orang atau kelompok yang saling memberi, dimana pihak penerima akan berusaha mengimbangnya.

Berbentuk bahan sembako selain itu yang paling sering dijumpai menjelang pemilu pembagian bahan makanan seperti beras, mie, telur dan yang tidak kalah penting adalah pemberian rokok gratis untuk kalangan anak-anak mudah ini merupakan hal yang tidak sulit kita jumpai pada saat jelang pemilu.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari proses penelitian yang di lakukan, peneliti merumuskan dua kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa persepsi penyelenggara terhadap pelaksanaan pemilukada serentak 2015 dalam pandangan para pihak penyelenggara pemilukada serentak bahwa pemilukada 2015 ini merupakan pemilukada serentak yang pertama dilakukan oleh bangsa indonesia sehingga persepsi penyelenggara bahwa pemilukada serentak adalah suatu pesta demokrasi untuk memilih pemimpin daerah yang tidak terlepas dari penggunaan anggaran yang menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya politik uang tetapi politik uang dapat diminimalisir karena penyelenggara pemilukada melakukan sosialisasi tentang hal tersebut.
- b. Bentuk-bentuk politik uang (*money politics*) dalam pemilukada serentak pada tahun 2015 di Desa Simpasai berupa penyaluran bantuan melalui bantuan sosial yang dilakukan oleh peserta pemilu ialah berbentuk uang, uang adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi acuan bagi setiap transaksi alat tukar menukar. Berbentuk material, dengan memberi semen, pasir dan traktor. dan di manfaatkan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang belum selesai di di bangun. Berbentuk barang yang sering di jumpai dikalangan masyarakat yaitu Sarung, jilbab, baju dan topi yang terjadi bukanlah sebatas pemberian dari seseorang kepada orang lain. Melainkan suatu sistem tukar menukar. Berbentuk sembako selain itu yang paling sering dijumpai menjelang pemilu pembagian bahan makanan seperti beras, mie, telur dan yang tidak kalah penting adalah pemberian rokok gratis untuk kalangan anak-anak mudah ini merupakan hal yang tidak sulit kita jumpai pada saat jelang pemilu.

2. Saran

- a. Untuk akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif terutama yang berkaitan dengan bidang ilmu politik dan ketatanegaraan. Serta menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat akademik agar menaati nilai-nilai serta asas-asas dalam pemilu
 - b. Untuk masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh para calon atau para tim sukses masing-masing calon agar segera melapor kepadapihak yang berwenang.
 - c. Untuk pemerintah dalam hal lembaga komisi pemilihan umum agar melakukan pengawasan lebih ketat lagi terhadap pelaksanaan pemilu agar tidak ada pelanggaran dan lebih banyak melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu, sehingga terwujud penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: LPPUNS dan UNS Press.
- Syarbani, Syahrial dkk. 2011. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Syaebani, Syahrial dkk. 2009. *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Internet
Jurnal penelitian Politik, Vol 4, no. 1, *Demokrasi mati suri*, Jakarta, 2007
- Indra J. Pilliang. 2011. *Korupsi dan Demokrasi*. Artikel Opini Kompas November 2011.
- Survey Indikator Politik Indonesia. 2013. *Sikap dan perilaku pemilih terhadap money politics*, Jakarta.
(www.antaraneews.com/.../bi-perkiraan-biaya-pilkada-2010-capai-rp4 diunduh tgl. 12 April 2016).
- <http://www.bimbingan.org/tujuan-pemilihan-kepala-daerah.htm> (Diakses Jumat, 16/01/2016)

DAFTAR RUJUKAN

- Ari Dwipayana. 2009. *Demokrasi Biaya Tinggi*, Yogyakarta: Jurnal Fisipol UGM,
- Dieter Roth. 2008. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori, Instrumen, dan Metode*, (Jakarta: Friedrich- Naumann Stiftung fur die Freiheit.
- Fuji Hastuti. 2012. *Politik Uang dalam Pemilu Kades tahun 2012*. Semarang: UNDIP.
- Halili. 2009. *Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal Humaniora FIS UNY, Yogyakarta.
- Hamdan Zoelva. 2013. *Memberantas Electoral Corruption*. Jakarta: Jurnal Pemilu dan Demokrasi.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi penuh muslihat*, Grahamedia, Jakarta.
- Heru Nugroho. 2001. *Uang, Rentenir dan Hutang Piutang di Jawa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indra Ismawan. 1999. *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*. Yogyakarta: Media Pressindo
- John Markoff. 2002. *Gelombang Demokrasi Dunia: Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. Yogyakarta, CCSS dan Pustaka Pelajar.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Nimmo. 1999. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, CV. Remaja Karya, Bandung Box-Steffensmeier, Janet M., and Kimball, David, , *The Timing of Voting Decisions in Presidential Campaign*.
- Maloeng, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kosdaya Karya.
- Maleong, J., L, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marjuki. 1989. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta : BPFE.
- Muh Masnur Zamanil Baddi. 2006. *Pelanggaran money politics pada pemilu 1999 (studi kasus di wilayah matraman dalam DKI Jakarta)*, Tesis Magister, Jakarta: FISIP UI.
- Moh. Koesnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: CV. Sinar Bakti,) hlm. 333
- Peter Harris dan Ben Reilly. 2000. *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar : Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*, Jakarta: International IDEA, hlm. 197.
- Riduwan. 2004. *Metode & Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sigit Pamungkas. , 2012. *Pemilu, Perilaku Pemilih & Kepartaian*. Yogyakarta.
- Sudjana. 2002. *Metode Statistik*. Bandung: PT. Tarsito.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.